

# PERENCANAAN LINGKUNGAN BERBASIS PARTISIPATIF DI DESA CUT MAMPLAM

**Rinaldi Mirsa**

Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Malikussaleh  
[rinaldiaceh@gmail.com](mailto:rinaldiaceh@gmail.com)

## *Abstrak*

*Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan suatu program penataan lingkungan permukiman yang didasarkan pada partisipatif masyarakat dalam merencanakan lingkungannya ke depan. Perencanaan partisipatif merupakan bagian dari kegiatan PLPBK yang fokus pada proses penyusunan rencana pengembangan lingkungan permukiman, dengan melibatkan partisipasi aktif Masyarakat baik BKM dan Unit-unit Pengelolaanya, Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang, Penataan Ruang, maka Rencana Perencanaan Lingkungan Permukiman (RPLP) bisa dikatakan merupakan penjabaran atau turunan dari RTRW Kota Lhokseumawe tahun 2013. Hal ini berarti RPLP Desa Cut Mamplam secara hirarkis harus mengacu pada RTRW Kota Lhokseumawe. Tujuan penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Desa Cut Mamplam adalah menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman yang berwawasan lingkungan untuk menghadapi tantangan perkembangan kota yang semakin kompleks pada masa mendatang dan dapat menjadi pedoman untuk.*

1. Pemberian perizinan bangunan.
2. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

**Kata-kata Kunci:** perencanaan lingkungan, partisipatif, dan permukiman.

## **I. PENDAHULUAN**

Desa Cut Mamplam terletak di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe berbatasan dengan.

- *Sebelah Utara* : berbatasan dengan Selat Malaka
- *Sebelah Selatan* : berbatasan dengan Desa Cot Girek/Alue Lim Kec. Blang Mangat

- *Sebelah Timur* : berbatasan dengan Desa Meunasah Manyang
- *Sebelah Barat* : berbatasan dengan Desa Meunasah Mee

Luas wilayah Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua adalah  $\pm$  250 Ha, terdiri dari 5 Dusun, 41 Lorong dan dengan ketinggian 0-5 meter di atas permukaan laut beriklim tropis dan suhu udara rata-rata

berkisar 20,6 derajat sampai dengan 32 derajat Celsius banyaknya curah hujan yaitu 110,7 mm/bulan.

Sedangkan dusun yang ada di Desa Cut Mamplam yang berjumlah 5 (lima) dusun saja, yang terdiri dari dusun-dusun sebagai berikut.

1. Dusun Kumbang,
2. Dusun Merak,
3. Dusun Intan,
4. Dusun Pangkarim, dan
5. Dusun Kayee Adang.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik dengan pendekatan berbasis komunitas, melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan penurunan kualitas (degradasi) akibat pembangunan, meminimalkan dampak kerugian bila bencana alam terjadi kembali pada masa yang akan datang (mitigasi bencana) dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak.

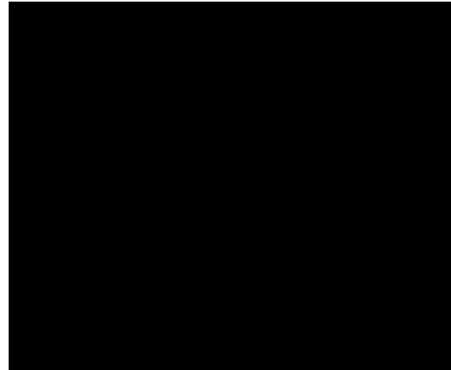
Penduduk Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua sebagian besar dihuni oleh petani yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan peternakan, perdagangan serta perkebunan. Heterogenitas penduduk menyebabkan kondisi sosial masyarakat yang mejemuk dengan dinamisasi yang tinggi serta permasalahan soaial yang kompleks, diantaranya pengangguran.

NO	DATA	JUMLAH
1	Jumlah penduduk	1984 jiwa
2	Jumlah kepala Keluarga	488 KK
3	Penduduk perempuan	1005 jiwa

4	Penduduk laki-laki	979 jiwa
5	Jumlah penganggur	337 jiwa
6	Jumlah keluarga Pra KS	198 KK
7	Jumlah keluarga KS-1	79 KK
8	Keluarga sejahtera (non) Pra KS-1	152 KK

**Tabel 1.**

Kependudukan di desa cut mamplam



**Gambar 1.** Grafik kependudukan di desa cut mamplam

Sebagai langkah awal pembangunan dan pengembangan wilayah desa Cut Mamplam, maka diperlukan peta desa dan juga Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). PLPBK ini disusun berdasarkan kesepakatan warga. Bagaimana masyarakat desa menyepakati bentuk penataan desa mereka, bagaimana proses penyusunan rencana penataan desa serta apakah rencana

pemanfaatan lahan di dalam PLPBK tersebut berpotensi mewujudkan kondisi lingkungan perdesaan lebih baik adalah beberapa hal yang akan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini.

Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Desa memberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas ruang dan perikehidupan masyarakat desa, seperti meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, industri yang lebih berkesinambungan, akses yang lebih baik ke fasilitas utama, infrastruktur yang lebih baik dan pergerakan transportasi yang lebih efisien. Upaya yang ditempuh untuk membangun, khususnya membangun lingkungan di perdesaan adalah dengan pendekatan penyusunan rencana gampong. Penyusunan rencana desa dengan berbasiskan kesepakatan adalah proses yang langka terjadi sebelumnya di Indonesia khususnya di Wilayah Provinsi Aceh, pertama pendekatan dalam perencanaan pembangunan baik fisik maupun lingkungan yang ada dan lazim terjadi di Provinsi Aceh bersifat terpusat dan *top down*. Kedua, bencana alam menjadi faktor pendorong bagi semua pihak untuk berpartisipasi penuh merencanakan desa.

### **Maksud dan Tujuan.**

Adapun kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) ini secara umum mempunyai maksud untuk menyesuaikan antara Rencana Tata Ruang Desa dengan

proses dan hasil pembangunan desa yang telah dilaksanakan sampai saat ini. Berangkat dari hal yang bersifat umum tersebut, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan menilai efektivitas hasil pelaksanaan PLPBK di Desa Cut Mamplam.

### **Sasaran.**

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran dari kegiatan ini antara lain adalah:

1. Terpantaunya tindak lanjut pelaksanaan program-program PLPBK desa;
2. Terinventarisasinya hal-hal yang sesuai, kurang sesuai/berpotensi menyimpang, atau tidak sesuai/menyimpang, dalam implementasi rencana desa;
3. Tersepakatinya langkah-langkah koreksi bersama *stakeholders*, yaitu warga dan tokoh desa, lembaga pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi desa, serta Pemerintah Daerah, yang bekerja di masing-masing desa;
4. Tersusunnya rekomendasi tindak lanjut, baik dalam jangka pendek oleh lembaga pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi desa, maupun dalam jangka menengah dan panjang oleh warga dan tokoh desa, dan Pemerintah Daerah terkait.

## II. TINAJUAN PUSTAKA

Istilah desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Yayuk dan Mangku, 2003). Istilah desa dan perdesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa (Antonius T, 2003).

Kuntjaraningrat(1977) mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu daerah, sedangkan Bergel (1995) mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani. Landis menguraikan pengertian desa dalam tiga aspek; (1) analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2500 orang, (2) analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya, dan (3) analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan

penduduknya tergantung kepada pertanian.

Dalam beberapa kajian dibedakan antara masyarakat kota (*urban community*) dan desa (*rural community*) berdasarkan letak geografis, kebiasaan dan karakteristik keduanya. Menurut Roucek dan Warren (1962) masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut; (1) peranan kelompok primer sangat besar; (2) faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat; (3) hubungan lebih bersifat intim dan awet; (4) struktur masyarakat bersifat homogen; (5) tingkat mobilitas sosial rendah; (6) keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi; (7) proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.

Sorokin dan Zimerman dalam T.L Smith dan P.E Zop (1970) mengemukakan sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik desa dan kota, yaitu; mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan solidaritas sosial.

## III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik yang digunakan

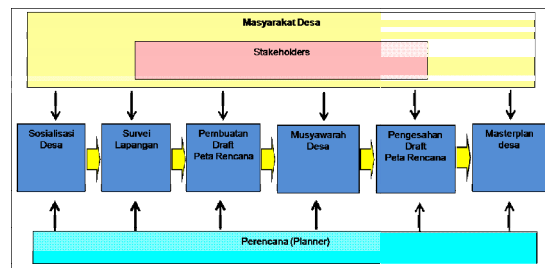
dalam metode kualitatif adalah teknik wawancara mendalam dan observasi langsung. Penelitian ini memfokuskan aspek proses pencapaian kesepakatan dalam penyusunan rencana gampong. Aspek proses penyusunan rencana gampong atau perencanaan gampong dilakukan melalui evaluasi formatif terhadap proses pencapaian kesepakatan yaitu apakah tercapai kesepakatan antara warga dalam penyusunan rencana gampong. Evaluasi ini akan meliputi telaah terhadap beberapa faktor antara lain kebutuhan waktu dalam penyusunan rencana gampong, pemangku kepentingan, konflik yang terjadi pada saat penyusunan rencana gampong, dan kebutuhan sumber daya.

Sebagai salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam melakukan pembangunan di Indonesia adalah pendekatan dari atas ke bawah (*top down*). Kelemahan pendekatan ini salah satunya adalah dalam hal rasa kepemilikan yang rendah dari masyarakat terhadap berbagai hasil pembangunan maupun sumber daya alam milik bersama. Karena masyarakat cenderung untuk tidak dilibatkan dalam proses pembangunan maka yang terjadi adalah masyarakatan minim pelibatan untuk menjaga berbagai fasilitas dan sumber daya alam milik bersama yang ada tersebut. Berbagai sumber daya alam milik bersama dan fasilitas tersebut menjadi tidak terawat, terdegradasi bahkan rusak sekalipun. Garret Hardin menyatakan bahwa sumberdaya milik bersama adalah sumber bencana, yaitu penyebab utama hancurnya sumberdaya alam

atau kerusakan lingkungan. Hal ini pula yang dikenal sebagai *The Tragedy of the Commons*.

Sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan pada tiap-tiap desa pun tidaklah seragam. Namun tujuannya adalah sama yaitu bagaimana mencapai kesepakatan agar proses pembangunan kembali dapat segera dilakukan. Prinsip-prinsip rencana tata ruang desa adalah sebagai berikut :

1. Rencana tata ruang desa harus mendorong pembangunan di lokasi-lokasi yang memerlukan pelestarian lingkungan hidup.
2. Mendorong pembangunan daerah-daerah yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, peluang ekonomi dan akses terhadap layanan dasar dan sarana prasarana di desa.
3. Rencana tata ruang desa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rencana desa harus menunjukkan lokasi-lokasi untuk gedung/jalur penyelamatan, sabuk hijau untuk mengurangi dampak lebih jauh bencana alam (disaster manajemen).



**Gambar 2.** Langkah dalam perencanaan Desa.  
Sumber: analisis, 2006.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Kondisi tata ruang & lingkungan hidup.**

**Penggunaan lahan** di Desa Cut Mamplam meliputi penggunaan sebagai perumahan, perekonomian, industri rumah tangga, pendidikan, pertanian, tambak dan wisata. Fungsi pertanian dan lahan tidak efektif masih mendominasi penggunaan lahan di Desa Cut Mamplam, yaitu sekitar 60%. Fungsi lainnya yaitu pertambakan yang ada di koridor utama jalan antar Propinsi (Banda aceh - Medan) sampai dengan laut. Sedangkan perekonomian perdagangan hanya muncul pada penggalan-penggalan tertentu koridor Jalan Propinsi (Banda aceh - Medan). Sementara itu untuk *home industri* tersebar di sebagian kawasan perumahan dan sebagian lagi di daerah luar permukiman. Desa Cut Mamplam.

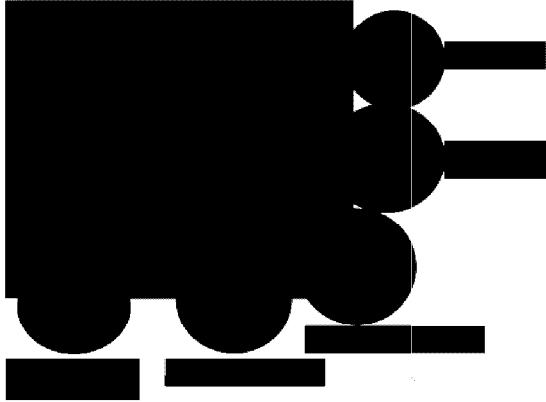
**Fungsi pendidikan** dalam kawasan juga tersebar di beberapa tempat, baik itu pendidikan formal, maupun pendidikan nonformal. Hal yang menjadi perhatian khusus dalam perencanaan pendidikan di Desa Cut Mamplam ini adalah pendidikan nonformal seperti dayah (pasantren).

**Kawasan lindung** yang perlu dikembangkan dan dijaga di Desa Cut Mamplam ini yaitu kawasan embung/situ. Karena belum terprogramnya dengan baik untuk dijadikan kawasan lindung maka situ/embung Desa Cut Mamplam belum dilakukan pemeliharaan dengan baik, seperti

pemeliharaan pintu air, pemeliharaan pendangkalan dasar embung/situ, sehingga masih perlu perencanaan dan pengembangan ke depan. Dengan belum terdapat suatu kawasan lindung dalam Desa Cut Mamplam yang secara hukum ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kawasan di sekitar embung/situ yang sedianya dapat menjadi kawasan lindung, sebagian telah berubah menjadi kawasan permukiman, kebun dan lahan terlantar. Sementara, banyak tanah kosong yang belum dimanfaatkan yang sementara ini menjadi area hijau (banyak ditumbuhi tanaman yang belum termanfaatkan secara baik dan benar untuk kepentingan masyarakat).

**Fungsi lainnya** yang juga muncul adalah kawasan wisata. Kawasan wisata yang ada di Desa Cut Mamplam adalah wisata situ/embung dan wisata pantai. Akan tetapi pemanfaatan dari kawasan wisata ini masih belum terencana dan terolah dengan baik, sehingga potensi yang ada masih belum dapat menyumbangkan hasil yang optimal kepada perkembangan perekonomian masyarakat di Desa Cut Mamplam. Potensi situ yaitu dapat dikembangkan untuk menjadi wisata air sekaligus mina wisata dan pemancingan serta sekaligus untuk mengairi sawah-sawah tadah hujan. Selain itu juga suplai air untuk mengisi embung juga harus ditingkatkan seperti membangun pompa air yang memanfaatkan kincir angin, selain hanya sumber dari tadah hujan. Wisata lain yang dapat dikembangkan adalah wisata bahari (wisata pantai dan muara),

hal ini juga belum terencana dengan baik karena terkendala kondisi kawasan yang masih memerlukan penanganan khusus.



**Gambar 3.** Kondisi Tata Ruang dan lingkungan Hidup di Desa Cut Mamplam.  
Sumber: analisis, 2012.



**Gambar 4.** Kondisi Wisata Pantai di Desa Cut Mamplam.  
Sumber: survei, 2012.



**Gambar 5.** Kondisi Kawasan Permukiman di Desa Cut Mamplam.  
Sumber: survei, 2012.



**Gambar 6.** Kondisi Kawasan Persawahan di Desa Cut Mamplam.  
Sumber: survei, 2012



**Gambar 7.** Kondisi Kawasan Embung/Situ di Desa Cut Mamplam.  
Sumber: survei, 2012.

### **Perumahan dan Bangunan**

Kondisi bangunan dalam kawasan sebagian besar telah berupa bangunan permanen. Bangunan yang paling banyak dijumpai adalah bangunan dengan fungsi sebagai rumah tinggal (hunian). Bangunan dengan fungsi pendidikan, kesehatan,

keamanan dan pemerintahan serta pendukung lainnya masih dalam kondisi yang cukup baik. Bangunan-bangunan permukiman yang berada di sepanjang sisi jalan membentuk pola linier (memanjang di sepanjang sisi jalan tersebut). Permukiman ini biasanya bentuknya lebih teratur, karena posisi kapling masing-masing perumahan sudah tertata rapi di sepanjang sisi jalan, meskipun ukuran dan bentuk kavling yang sangat bervariasi.

Meskipun sebagian besar rumah berfungsi tunggal, namun terdapat pula rumah yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tempat tinggal dan sebagai fasilitas usaha (*home industri*), misalnya untuk berjualan, warung, serta untuk industri kerajinan rumah tangga (pembuatan makan, perajin tahu, pembuatan keripik, penggilingan kopi, dan lainnya).

Dari seluruh rumah yang terdapat di Desa Cut Mamplam, 50% merupakan rumah permanen (berdinding batu bata); 30% merupakan rumah semi permanen (berdinding setengah batu bata), dan 20% merupakan rumah nonpermanen (berdinding kayu). Sebagian besar bangunan rumah merupakan rumah sehat. Sementara, rumah nonpermanen yang berdinding kayu tersebut masuk dalam kategori rumah kurang layak huni, karena sebahagian masih berantai tanah, tidak memiliki bidang bukaan pintu dan jendela yang cukup, serta tidak dilengkapi dengan fasilitas sanitasi keluarga.

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)
1	Pertanian	60 Ha
2	Perkebunan	136 Ha
3	Tempat pendidikan	2 Ha
4	Tempat Peribadatan	0,5Ha
5	Pemukiman	50 ha
6	Pertokoan	1 Ha
<b>TOTAL</b>		<b>250 Ha</b>

**Tabel 2.**

Penggunaan Lahan Di Desa Cut Mamplam



**Gambar 8.** Grafik Penggunaan Lahan di Desa Cut Mamplam  
 Sumber: analisis, 2012.

**V. KESIMPULAN.**

1. Penyusunan rencana *gampong* dengan pendekatan berbasis kemufakatan masyarakat efektif dalam merespons kebutuhan mendesak perencanaan



pembangunan perdesaan. Rencana *gampong* dapat disusun dalam waktu yang relatif singkat. Efektif dalam pelibatan masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan. Rencana *gampong* (desa) yang disusun merupakan upaya pembangunan kembali lingkungan perdesaan di Provinsi Aceh. Seluruh kegiatan yang diimplementasikan adalah berbasiskan kesepakatan yang telah dicapai pada saat penyusunan rencana *gampong*. Dengan demikian proses penyusunan rencana *gampong* merupakan suatu bentuk perencanaan partisipatif (*participatory planning*) yang dapat diaplikasikan secara efektif.

2. Proses pencapaian kesepakatan dilakukan dengan memberikan pemahaman mendalam terlebih dahulu kepada para tokoh kunci di masing-masing desa oleh pendamping (Fasilitator). Para tokoh kunci inilah yang kemudian menjadi media komunikasi dan sosialisai yang efektif terhadap berbagai rencana yang ada dalam *rencana gampong* kepada penduduknya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

Antonius Tarigan (2003), *Rural-Urban Economic Linkage*, dalam Jurnal Forum Inovasi Capacity Building & Good Governance, hal 72-76 Jakarta

- Bintarto R, (1983) *Interaksi desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintoro Tjokroamidjojo (1993) *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji
- Departemen Dalam Negeri-Lembaga Administrasi Negara (2007) *Pedoman Umum Formulasi Perencanaan Strategis (Formulasi of Strategic Planning)*. Jakarta: SCB-DP. Jakarta.
- Rapoport, Amos., 1982, *The meaning of The Built Environment*, A Nonverbal Communication Approach, Sage Publications, Beverly Hills, London, New Delhi.
- Rossi, Aldo., 1982, *The Architecture of The City*, The MIT Press, Cambridge, Massacusetts, and London, England.
- Shirvani, Hamid., 1985, *The Urban Design Process*, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- Suwardjoko Warpani (1984) *Analisis Kota dan Daerah*, Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Trancik, Roger., 1986, *Finding Lost Space, Theories of Urban Design*, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- Toft S., Graham (2000) "Synoptic (One Best Way) Approaches of Strategic Management" dalam *Handbook of Strategic Management*. 2<sup>nd</sup> Edition Revised and Expanded; (Ed: Jack Rabin, Gerald J. Miller. W Barley

- Hildreth. New York: Marcel Decker, Inc
- Untermann, Richard K., 1992, *Accomodation The Pedestrian; adapting Towns and Neighborhoods for Walking and Bicycling*, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- Whyte. William H., 1980, *The Social Life of Small Urban Space*, The Conservation Foundation, Washington D.C
- Yayuk Y dan Mangku P, (2003) *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama